

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH DI PARIT NENAS KELURAHAN SIANTAN HULU

Sari Aji Pratiwi ¹⁾, Nana Novita Pratiwi ²⁾, Vetti Puryanti²⁾
sariajipratiwii@gmail.com

Abstrak

Parit Nenas merupakan salah satu lingkungan permukiman kumuh di Kota Pontianak. Tercantum dalam RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan) dibagan skala prioritas dan pola penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan Kota Pontianak, parit nenas masuk dalam prioritas penanganan pertama. Perlunya penelitian ini untuk mengkaji keterlibatan masyarakat dalam proses dan pemahaman partisipasi masyarakat pada program peningkatan kualitas permukiman di kawasan prioritas permukiman kumuh lingkungan parit nenas, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara.

Metode penelitian yang digunakan ialah metode deksriptif dan asosiatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan purpose sampling dalam pemilihan informan awal. Selanjutnya, menentukan sumber informasi dengan teknik snowball sampling diikuti dengan triangulasi untuk pengabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan warga parit nenas melakukan program-program peningkatan kualitas permukiman kumuh sesuai dengan tahapannya. Warga berpartisipasi secara jenis dan model partisipasi yang terdiri atas pikiran, tenaga, pikiran dan tenaga, keahlian, barang, uang dan dana serta Can do, Like to, Enable to, Aksed to, dan Responded to. Ada kekurangan partisipasi dalam hal pemahaman program dan jenis partisipasi uang. Hal ini menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat dikategorikan "Tokenisme" dan dikarenakan warga belum memiliki tingkat pemahaman dan kemampuan dalam tahap keberlanjutan program. Berdasarkan hasil penelitian, merekomendasikan perlunya langkah-langkah pendekatan yang lebih intens dan menarik untuk menarik partisipasi warga.

Kata-kata kunci: *Jenis partisipasi, Model partisipasi, dan Tingkatan partisipasi*

1. PENDAHULUAN

Permukiman kumuh timbul disebabkan oleh sekelompok masyarakat yang tinggal di suatu ruang wilayah tanpa memperhatikan fasilitas penunjang dalam menempati suatu kawasan. Hal ini akan memberikan efek estetika dan visual yang buruk, maka perlunya kontribusi masyarakat lingkungan dalam penanganan permukiman kumuh. Penanganan permukiman tidak hanya secara fisik namun juga perlu melibatkan partisipasi masyarakat.

Keith Davis pada bukunya *Human Relations at work* (1962) dalam M.Ramlan (2010:11), menyatakan: "Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan".

UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dijadikan sebagai landasan hukum

dan dasar penyusunan RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan) Kota Pontianak. Adapun hasil kebijakan dari SK Walikota Pontianak No 367/D-PRKP/Tahun 2017 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Pontianak 2017 menyebutkan 18 Lokasi Kelurahan, di 6 Kecamatan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan prioritas pembangunan dalam bidang perumahan dan permukiman kumuh. Salah satunya menyebutkan Kelurahan Siantan Hulu yang terdiri atas 4 lokasi. Siantan hulu 4 parit nenas Kelurahan Siantan Hulu memiliki tingkat kekumuhan berat.

Sedangkan dalam RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan) dibagan skala proiritas dan pola penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan Kota Pontianak lokasi siantan 4 parit nenas masuk dalam prioritas penanganan pertama. Kawasan tersebut dikatakan kumuh dilihat dari penilaian kawasan kumuh berdasarkan kriteria dan indikator secara fisik dan non fisik, dan lainnya.

Program-Program peningkatan kualitas permukiman kumuh yang sudah berlangsung di lingkungan parit nenas diantaranya Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dan SANIMAS (Sanitasi Masyarakat). Kedua program tersebut merupakan program berkelanjutan guna menjaga kualitas lingkungan sosial masyarakat dalam penanganan kawasan permukiman kumuh.

Sehingga penelitian ini rasa sangat diperlukan dengan tujuan untuk mengkaji keterlibatan masyarakat dalam program peningkatan kualitas permukiman di

kawasan permukiman kumuh parit nenas, Kelurahan Siantan Hulu.

1.1 Rumusan Masalah

Kegiatan perumahan dan permukiman di parit nenas Kelurahan Siantan Hulu memiliki karakteristik keberadaan rumah-rumah daratan dengan batas tepi air berupa parit menjadi salah satu kurangnya nilai estetika kawasan Kota Pontianak jika tidak ditangani secara khusus akan menimbulkan titik-titik kemungkinan menjadi kawasan permukiman kumuh baru.

Masalah – Masalah yang ada perlu diatasi dengan melakukan upaya penanganan perbaikan lingkungan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang selama ini dilakukan dengan tetap melibatkan partisipasi masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. “Bagaimana partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas permukiman di kawasan prioritas permukiman kumuh di lingkungan Parit Nenas, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara?”

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Permukiman dan Permukiman Kumuh

Permukiman berasal dari kata “*housing*” dalam bahasa Inggris yang artinya adalah perumahan dan kata “*human settlement*” yang artinya permukiman. Permukiman memberi pengertian mengenai pemukim atau kumpulan permukim beserta sikap dan prilakunya didalam lingkungan, sehingga permukiman minitikberatkan pada sesuatu yang bukan bersifat fisik atau benda mati yaitu manusia (*human*) (Auliannisa, 2009).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, tidak mengenal adanya istilah kawasan kumuh, yang ada Permukiman kumuh dan Perumahan kumuh. Menurut UU Nomor 1 Tahun 2011 Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Sedangkan Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Ciri khas permukiman kumuh menurut Prof. DR. Parsudi Suparlan, yaitu:

- Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai.
- Kondisi hunian rumah dan pemukiman serta penggunaa ruang-ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin.
- Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di pemukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.
- Pemukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komuniti yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas.

2.2 Perencanaan Partisipatif

Partisipasi masyarakat merupakan pendekatan pembangunan yang memandang masyarakat dalam konteks

dinamis yang mampu memobilisasi sumber daya sesuai dengan kepentingan, kemampuan dan aspirasi yang dimiliki, baik secara individu maupun komunal (Hall, 1998:9).

Menurut Keith Davis dalam Hardian (2016:13), menyebutkan jenis – jenis partisipasi meliputi :

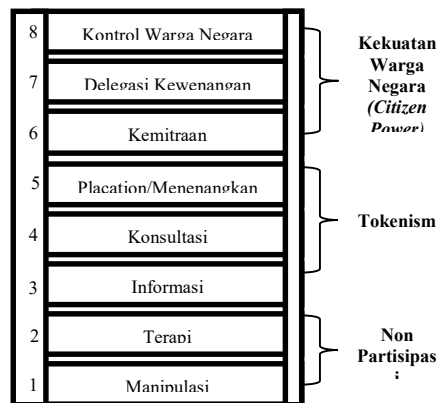
- Pikiran (psychological participation);
- Tenaga (physical participation);
- Pikiran dan tenaga (psychological and pshysical participation);
- Keahlian (participation with skill);
- Barang (material participation);
- Uang/dana (money participation).

Model CLEAR yang ditawarkan lowndes, praychett dan stoker (2006) dalam Karianga (2011:233), digunakan untuk mengidentifikasi lima faktor yang menyebabkan ketidaksamaan respon warga terhadap partisipasi. Model CLEAR berpendapat bahwa partisipasi akan sangat efektif dimana masyarakat :

- **Can Do** – have the resources and knowledge to participate;
- **Like to** – have a sense of attachment that reinforces participation;
- **Enable to** – are provided with the opportunitr for participation;
- **Aksed to** – are mobilized through public agencies and civiv channels;
- **Responded to** – see evidence that their views have been considered.

Tingkatan partisipasi masyarakat dan stakeholder dapat merujuk kepada arnstein (2007) mengenai "*A Ladder of*

Citizen Participation” dalam “Buku Pengembangan Masyarakat” (Nasdian, 2015), tingkatan-tingkatan tersebut, adalah :



Gambar 1 Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Sumber : Arnstein (2007)

2.3 Proses Partisipatif

Dalam artikel Aziz Turindra (2011), ada beberapa tahapan dari partisipasi masyarakat, yaitu:

- Tahap partisipasi dalam pengambilan keputusan;
- Tahap partisipasi dalam perencanaan pembangunan;
- Tahap partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan;
- Tahap partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan;
- Tahap partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan.

Dalam partisipasi masyarakat dikenal adanya tipe partisipasi, modus partisipasi dan siklus partisipasi. Ada tiga tipe partisipasi masyarakat dalam pembangunan, diantaranya :

- Partisipasi dalam membuat keputusan;
- Partisipasi dalam implementasi;
- Dalam kegiatan evaluasi.

3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif melalui metode kualitatif dengan desain deskriptif dan asosiatif. Dalam metodologi penelitian pertama-tama melakukan pemilihan informan dengan cara *purposive sampling* pengambilan sample berdasarkan kapasitas dan kapebelitas atau yang komponen/bener-bener dibidangnya.

Selanjutnya pengambilan sampel dengan menggunakan teknik Snowball Sampling (Sample bola salju). Menurut Patton (1990), Snowball Sampling adalah suatu pendekatan untuk menemukan informan-informan kunci yang memiliki banyak informasi.

3.1. Observasi

Metode observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan partisipasi moderat (*Moderat Participation*) yg digunakan dalam penelitian ini.

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada teknik wawancara, khususnya wawancara mendalam (*depth interview*). Wawancara dilakukan kepada beberapa informan yang sudah masuk dalam list informan.

2. Dokumentasi

Dokumen tentang foto-foto kegiatan, data-data statistik, dan data struktur organisasi.

Proses menganalisis data yang sudah didapat peneliti menggunakan teknik analisis data sebagai berikut .:

- Reduksi data ini berlangsung terus menerus selama kegiatan penelitian yang berorientasi kualitatif berlangsung terus-menerus selama kegiatan penelitian. Reduksi dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis asosiatif
- Analisis deskriptif ini digunakan untuk mengelola hasil data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan data pendukung dari pihak yang terkait.
- Analisis asosiatif digunakan untuk menghubungkan antar variable yang ada ataupun data yang didapatkan saat melakukan analisis deskriptif.
 - Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan tindakan.
- Pemeriksaan Keabsahan Data ini peneliti menggunakan triangulasi data yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. (dalam sugiyono, 2009).
 - Pengambilan Kesimpulan, penelitian kualitatif dengan menggunakan 2 teknik analisis ini akan di

bandingkan dengan kesesuaian partisipasi masyarakat pada teori guna mendapatkan kesimpulan yang diinginkan berupa rekomendasi

4. HASIL DAN ANALISIS

4.1 Program-Program Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Parit Nenas, Kelurahan Siantan Hulu

Program KOTAKU dan Program SANIMAS merupakan program yang saling berkaitan guna meningkatkan kualitas lingkungan dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung dilapangan.

a. Program KOTAKU

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) merupakan program yang memiliki tujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

b. Program SANIMAS

Program SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat) merupakan kegiatan dari pemberian dana bantuan pemerintah, sebagai bentuk inisiatif untuk mempromosikan penyediaan prasarana dan sarana air limbah permukiman yang berbasis masyarakat dengan pendekatan tanggap kebutuhan. Fokus dari program ialah penanganan air limbah rumah tangga.

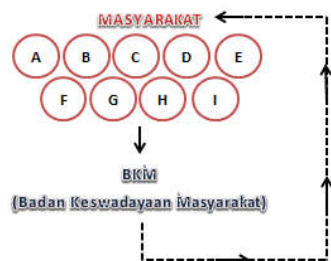
Program SANIMAS di lingkungan parit nenas ini baru pertama kali pada akhir tahun 2017 hingga awal tahun 2018.

Program SANIMAS dilakukan di lokasi RT 1 RW 18 yang masuk dalam lokasi penelitian. Program ini memiliki target pengerjaan selama 90 hari kerja. Lokasi pembangunan IPAL dilakukan secara keterbukaan dengan melibatkan warga lingkungan RT 1 dan 2 RW 18, BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), Konsultan.

4.2 Proses Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Parit Nenas

Tahapan awal ialah menentukan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), dibentuk dan dipilih langsung oleh masyarakat Kelurahan Siantan Hulu atas hasil keputusan bersama.

Berikut bagan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan satuan kelompok di masyarakat.



Gambar 1. Proses Pembentukan BKM
Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2018

Pembentukan satuan kerja masyarakat ini dibentuk melalui musyawarah warga dan melakukan pembentukan dan pemilihan koordinator masing-masing bidang BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). Adapun tugas dari BKM (Badan Keswadayaan

Masyarakat) dalam pelaksanaan program diantaranya :

- memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan pelaksanaan program-program yang dilaksanakan di Kelurahan Siantan Hulu.
- membuat data base lingkungan yang perlu diperbaiki baik sarana maupun prasarana.
- suatu badan yang terdiri atas beberapa koordinator untuk masing-masing program yang ada di Kelurahan.

Selanjutnya masuknya Program Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Parit Nenas, diantaranya :

4.2.1. Program KOTAKU

Tahapan program KOTAKU yang masuk dalam pembahasan penelitian diantaranya. Tahap Persiapan, Tahap Perencanaan dan Rencana Aksi P2BM. Sehingga mencakupi beberapa tahapan Program KOTAKU semua melibatkan partisipasi warga. Tahapan-tahapan Program KOTAKU terbagi (4) empat. diantaranya :

a. Tahap Persiapan

Tahapan persiapan dalam Program KOTAKU yaitu sosialisasi awal dan rebug kesiapan masyarakat. Sosialisasi disampaikan langsung oleh Pemerintah Kota dan tim fasilitator KOTAKU kepada Pemerintah Kelurahan dan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat).

Sosialisasi KOTAKU yang berperan memberikan pemahaman output dan proses dari program. Sosialisasi ini sudah berlangsung dari awal tahun 2017 sejak adanya isu perbaikan gertak kayu

dan hingga tahap negosiasi kepada warga RT 02 & RT 01-RW 18 serta RT 01-RW 17 yang rumahnya mengalami penggusuran akibat pembangunan gertak kayu.

Sosialisasi juga digunakan sebagai wadah negosiasi ganti rugi bangunan warga di tepian sungai. Namun sosialisasi terhenti dikarenakan adanya penundaan pembangunan gertak akibat adanya rencana pembangunan baru.

Program KOTAKU tetap berlanjut tidak hanya terpaku pada pembangunan gertak kayu parit nenas. Ada program KOTAKU lain untuk perbaikan kualitas lingkungan.

b. Tahap Perencanaan

- Kegiatan Pemetaan Swadaya dan Pelatihan Persiapan Program

Dalam tahap perencanaan Program KOTAKU memiliki tujuan untuk menunjang kesiapan warga dalam mengelola program peningkatan kualitas permukiman kumuh. Dalam tahap perencanaan dilakukan beberapa penyampaian dari fasilitator kepada masyarakat, diantaranya :

Analisis aset kelurahan yang melibatkan masyarakat langsung dalam melakukan kajian aset, meliputi : sumber daya alam, sumber daya manusia, sosial, infrastruktur, dan keuangan. Analisis ini untuk menggali potensi wilayah guna melaksanakan program pembangunan yang akan berlangsung. Tidak hanya menggali potensi namun juga melihat kendala dan permasalahan sarana prasarana lingkungan.

Pemetaan lingkungan merupakan kegiatan mapping untuk melihat seberapa besar warga lingkungan mengenal lingkungannya. Pentingnya proses

sosialisasi pada mapping supaya warga serta fasilitator lebih mengenal lingkungan mana yang perbaikan kualitas permukimannya di utamakan.

Pelatihan keuangan dilakukan oleh fasilitator yang mendampingi berjalannya program kepada BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Kesiapan masyarakat dalam pelaporan pelaksanaan program sangat dibutuhkan untuk bukti administrasi dalam penggunaan biaya pelaksanaan pembangunan.

c. Tahap Pelaksanaan

Rencana pelaksanaan Program KOTAKU dalam implementasi pembangunan gertak parit seharusnya dapat dilaksanakan dari tahun 2017. Namun hingga saat ini belum terlaksana akibat adanya perubahan rencana awal yang hanya satu jalur gertak kini direncanakan untuk dua sisi kanan dan kiri parit nenas.

d. Tahapan Keberlanjutan

Tahap keberlanjutan dari Program KOTAKU pembangunan gertak parit nenas adanya isu wisata tepian parit nenas. Tahap ini melibatkan masyarakat dalam memanfaatkan hasil Program nantinya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat parit nenas.

4.2.2. Program SANIMAS

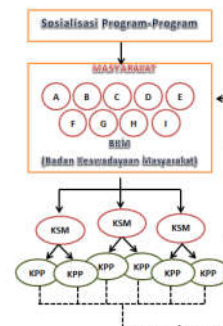
Program SANIMAS merupakan salah satu program penyediaan prasarana dan sarana air limbah rumah tangga yang melibatkan partisipasi langsung masyarakat dari proses awal hingga akhir yang berkelanjutan yang mencakup beberapa tahapan, diantaranya :

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan Program SANIMAS terbagi atas 3 (tiga) tahapan yang diantaranya : Tahap sosialisasi program dilakukan oleh pihak kelurahan yang didampingi oleh Fasprov (Fasilitator Provinsi), TFL (Tenaga Fasilitator Lapangan), dan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). Sosialisasi dilakukan dengan memberikan informasi atas kegiatan program SANIMAS kepada masyarakat yang mencakup pemahaman dari awal-proses dan tujuan akhir dari program.

Tahap Survei awal dalam SANIMAS dilakukan oleh pihak TFL (Tenaga Fasilitator Lapangan) dan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) yang turun langsung ke titik lokasi. Dalam tahapan survey lokasi melibatkan partisipasi masyarakat penuh untuk pemilihan calon lahan dibangunnya IPAL

Keputusan persetujuan akhir warga, lokasi terpilih pembangunan IPAL di RT 01 RW 18. Selanjutnya dilakukan rembuk warga yang membahas kesiapan menerima adanya IPAL SANIMAS. Adanya kesiapan ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya, Pembentukan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), Tim Pengadaan Barang dan Jasa, dan KPP (Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan). Dari bagan dibawah dapat dilihat KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan KPP (Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan) dibentuk setelah tahap sosialisasi program SANIMAS di lingkungan parit nenas.



Gambar 2. Pembentukan KSM dan KPP
Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2018

KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) bertugas sebagai pelaksanaan program pembangunan SANIMAS dari awal perencanaan, pengadaan barang, RKM (Rencana Kerja Masyarakat) hingga pelaksanaan pembangunan hingga hasil. KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) nantinya sebagai pengawas berjalannya program yang didampingi oleh BKM, unit pelaksanaan dan TFL (Tim Fasilitator Lapangan).

b. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan Program SANIMAS terbagi atas 2 (dua) tahapan yang diantaranya :

Tahap penyusunan RKM (Rencana Kerja Masyarakat) disusun bersama dengan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) sebagai pelaksana lapangan, BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dan didampingi TFL (Tim Fasilitator Lapangan). RKM ini berisikan pelaksanaan program secara administratif seperti tahap persiapan program, pembuatan DED dan RAB.

Dalam Pembuatan RKM (Rencana Kerja Masyarakat), KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) RT 02 RW 18

mulai melakukan rembuk untuk pembagian tugas. Tugas dalam pelaksanaan kerja tidak memandang status gender namun memiliki masing-masing peran. KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) mulai membuat list nama warga yang berminat ikut serta dalam pelaksanaan, mulai dari pemantauan, tenaga kerja, penyiapan logistik, materi dan alat-alat untuk pelaksanaan pembangunan.

Tahap pilihan prasarana dan sarana sanitasi dilakukan oleh TFL (Tim Fasilitator Lapangan). BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) menerima hasil pilihan dan desain IPAL yang akan dibangun. Pemilihan lokasi pembangunan IPAL di tentukan berdasarkan pertimbangan TFL (Tim Fasilitator Lapangan) bidang teknis SANIMAS.

c. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan Program SANIMAS terbagi atas 2 (dua) tahapan yang diantaranya :

Tahap Persiapan Kontruksi dan Pelaksanaan Kontruksi mengadakan rembuk warga dengan pembahasan pelaksanaan pembangunan IPAL lingkungan. Pengarahan kerja yang dilakukan oleh TFL (Tim Fasilitator Lapangan) SANIMAS kepada warga secara langsung. Pelaksanaan melibatkan warga dengan tugas pokok tenaga kerja dalam pembangunan. Jumlah tenaga yang berasal dari warga bekisar 8-15 orang dalam tahap pembangunan awal IPAL SANIMAS

Tahap program SANIMAS pembangunan sarana IPAL di parit nenas adanya tahap adendum dan amandemen

kontrak. Tahap adendum dan amandemen kontrak dilaksanakan akibat pengerjaan pembangunan IPAL lebih dari target kerja yang sesuai dengan petunjuk teknis yaitu 90 hari. Dalam tahap ini adanya musyawarah warga yang ikut serta dalam proses adendum. Saran masukan warga yang sangat penting dikarenakan tenaga kerja dalam pelaksanaan semua berasal dari lingkungan RT 02 RW 18 dan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat).

Setelah dapat persetujuan dari Dinas PU (Pekerjaan Umum) maka pembangunan dilanjutkan dengan tambahan waktu yang sudah ditetapkan.

d. Tahap operasional dan keberlanjutan.

Pembangunan IPAL SANIMAS di lingkungan parit nenas hanya untuk jangkauan RT 02 RW 18 sekitar 60 rumah. Namun dalam penyambungan koneksi perpipaan ke IPAL ada kendala, dikarenakan beberapa warga tidak mau menggunakan sarana yang sudah terbangun. Maka sosialisasi IPAL SANIMAS akan diadakan kembali untuk memberikan informasi penggunaan dan fungsi kepada masyarakat.

Keberadaan KPP yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemanfaatan dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Tujuan dari tahap ini, KPP dapat mengajak warga agar dapat menggunakan dengan baik dan menjaga sarana IPAL SANIMAS. Selanjutnya, kembali rembuk yang diikuti oleh BKM, KSM, KPP dan warga yang membahas akan pembiayaan untuk pengoperasian sarana.

4.2.3. Penghambat Partisipasi dalam Pelaksanaan Program

Penghambat partisipasi dapat disebabkan oleh kondisi alam, sosial, dan ekonomi masyarakat. Berikut penjabaran kendala – kendala partisipasi masyarakat yang dapat menghambat pelaksanaan program :

a. Sosial

Warga mengalami kecemburuan social diantaranya ditemukan pada tahap sosialisasi dan perencanaan program. Pada tahap sosialisasi Program SANIMAS ada beberapa warga tidak konsisten dalam pengambilan keputusan. Warga setempat masih dapat terpengaruh oleh masukan warga lain yang tidak setuju akan berlangsungnya program.

Selanjutnya permasalahan kesadaran warga dalam pemeliharaan dan pemanfaatan hasil program. Belum berjalannya fungsi dari KPP (Kelompok Pemeliharaan dan Pemanfaatan) Program SANIMAS dalam meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat pada tahap operasional dan pemeliharaan.

b. Alam

Saat pelaksanaan lokasi terpilih di RT 01 RW 18 mengalami longsor sebanyak 5 kali. Hal tersebut menyebabkan pengerjaan secara berulang oleh tenaga kerja berdampak penundaan dan penambahan waktu kerja. Pelaksanaan pembangunan IPAL lingkungan Program SANIMAS mengalami masalah dalam proses pelaksanaan yang diakibatkan oleh musim penghujan dengan kondisi lahan tergenang oleh banjir. Sehingga kondisi tersebut tidak memungkinkan warga

untuk melanjutkan proses pembangunan IPAL.

c. Keuangan

Kendala dalam tahapan pelaksanaan program ialah pengadaan biaya untuk pembangunan IPAL SANIMAS. Penghambat alam yang terjadi pada proses pembangunan menyebabkan adanya penambahan bahan material, biaya upah tenaga warga yang diluar rencana maka mengalami ketidaksesuaian dengan alokasi dana yang sudah dirembukan. Maka terjadinya biaya tambahan di luar rencana dan target pengerjaan.

4.3 Pemahaman Masyarakat Dalam Program Prioritas Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Di Parit Nenas

Berdasarkan landasan teori menurut Keith Davis dalam Hardian (2016:13) menyebutkan jenis-jenis partisipasi yang disesuaikan pelaksanaan dilapangan pada Pogram Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh, diantaranya :

a. Pikiran;

Partisipasi masyarakat salah satunya melalui pikiran dengan penyampaian ide gagasan terutama pada tahap persiapan dan perencanaan program. Untuk masyarakat parit nenas dalam kontribusi penyampaian ide gagasan/pikiran sudah nampak. Pandangan sebagian masyarakat dengan keberadaan program-program lebih cenderung pada pembagian bantuan dari pemerintah secara gratis.

Partisipasi menunjukan sebagian masyarakat belum dapat memahami

program. Sehingga masih ada beberapa warga yang pasif dalam peyampaian ide gagasan/pikiran saat tahap rembuk program.

b. Tenaga;

Partisipasi tenaga dapat terlihat dari keterlibatan beberapa warga parit nenas yang sedia menjadi pekerja dalam kegiatan pelaksanaan Program SANIMAS. Untuk pelaksanaan Program SANIMAS tenaga kerja berasal dari beberapa warga. Walaupun masyarakat yang bekerja sebagai tenaga dalam pembangunan tetap mendapatkan upah setiap harinya.

c. Pikiran dan Tenaga;

Pelaksanaan rapat/rembuk dapat menggambarkan kontribusi partisipasi masyarakat secara pikiran dan tenaga. Hal tersebut terlihat bahwa masyarakat sadar untuk melibatkan diri penyampaian masalah, solusi, potensi yang ada di lingkungan parit nenas. Partisipasi pikiran dan tenaga terlihat dari adanya agenda rutin rembuk dan rapat program peningkatan kualitas permukiman kumuh.

d. Keahlian;

Partisipasi keahlian dapat terwujud dari partisipasi masyarakat yang dapat mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk ikut serta dalam mencapai tujuan dari program.

Tipe keahlian yang harus dimiliki BKM, KSM, dan KPP yaitu Leadership. Seberapa besar peran BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), KPP (Kelompok Pemeliharaan dan Pemanfaatan) dalam berusaha mengajak masyarakat dalam berpartisipasi setiap

tahap dari program-program peningkatan kualitas permukiman kumuh parit nenas.

Dibuktikan dari pelaksanaan program SANIMAS, pihak BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dapat menggerakkan serta mengajak warga untuk ikut serta dalam pelaksanaan bukan hanya menerima bersih dari hasil program.

e. Barang;

Partisipasi barang dapat dilihat ada atau tidaknya sumbangan secara materi dari warga lingkungan program. Tingkat inisiatif untuk pengadaan konsumsi warga yang menjadi tukang tetap ada, terkadang ada sumbangan makanan kecil dan minuman untuk para tukang. Selain itu, ada partisipasi masyarakat dalam peminjaman alat tukang untuk pelaksanaan pembangunan. Kedua hal tersebut dapat dikatakan partisipasi masyarakat secara materi yang secara langsung oleh warga lingkungan parit nenas.

f. Uang dan Dana.

Partisipasi uang dan dana belum terlihat dalam pelaksanaan program SANIMAS. Hal tersebut dapat dinilai dari minimnya bantuan secara materi berupa uang. Hal ini dikarenakan saat program berlangsung ternyata memiliki kekurangan dana pembangunan yang disebabkan oleh lamanya waktu. Tetapi karna warga setempat sebagian besar termasuk golongan ekonomi rendah jadi tidak memungkinkan untuk membantu secara materi (uang). Namun untuk tahap pemeliharaan dan pemanfaatan adanya wujud dari partisipasi uang dan dana yang berasal dari masyarakat.

Model CLEAR yang ditawarkan lowndes, praychett dan stoker (2006) dalam Karianga (2011:233), di lihat pada pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh, diantaranya :

a. Can do (Mampu)

Upaya peningkatan kemampuan yang ditujukan bahwa masyarakat juga diberi dukungan untuk meningkatkan keterampilan dan sumber daya yang dibutuhkan mereka untuk terlibat. Seluruh masyarakat parit nenas dapat terlibat meskipun tidak memiliki pengalaman dalam pelaksanaan program sebelumnya.

Masyarakat memilih sendiri untuk koordinator dari BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan KPP (Kelompok Pemeliharaan dan Pemanfaatan) kepada warga yang sudah memiliki pengalaman sebelumnya. Hal ini menunjukan warga yang belum memiliki pengalaman dalam berorganisasi tidak berani terlibat secara langsung.

b. Like to (Ingin)

Pentingnya rasa ingin menjadi bagian dari suatu lingkungan dan program dalam partisipasi dapat menumbuhkan rasa perasaan ingin terlibat secara langsung. Untuk program-program peningkatan kualitas permukiman kumuh di lingkungan parit nenas sudah mulai kurangnya tingkat inisiatif gotong royong antar warga. Dikarenakan minimnya kegiatan pembangunan atau pemeliharaan.

Dalam pelaksanaan program dari awal tahapan tidak memandang

keterbatasan partisipan agar tetap merasa bagian dan dianggap serta tidak menghambat proses partisipasi.

c. Enable to (dimungkinkan)

Perlunya umpan balik saat melaksanakan program agar partisipan merasa “keberadaannya” nyata dalam suatu pelaksanaan program. Namun dilapangan sosialisasi terhambat karena ada beberapa warga yang kurang peduli lingkungannya dan kurang paham akan maksud serta tujuan dari program tersebut. Masyarakat sebelum mendapatkan program, adanya pelatihan yang difasilitasi oleh penyedia program. Pelatihan dilakukan guna mempersiapkan kemampuan saat pelaksanaan program.

d. Aksed to (Diminta)

Partisipan Program KOTAKU dan Program SANIMAS sebagian besar mempunyai pengalaman dari lingkungan.. Pendekatan yang digunakan ini diharapkan dapat mengajak warga lainnya untuk berpartisipasi. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi warga lainnya yang telah memberikan kepercayaan terhadap masyarakat yang memiliki pengalaman sebelumnya dengan hasil mendapat partisipasi yang cukup untuk pelaksanaan program.

Sebagian partisipan yang ikut serta dalam pekerjaan pembangunan IPAL ialah warga yang memiliki pekerjaan serabutan. Hal tersebut membuat warga bekerja untuk mendapatkan upah. Namun dengan kondisi warga yang memiliki lingkungannya maka memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang dimiliki.

e. Responded to (Menanggapi)

Kondisi masyarakat yang berpartisipasi memberikan menaruh harapan kepada pemerintah dalam menyediakan fasilitas dan biaya dalam pembangunan atau berjalanya program. Sedangkan dengan kondisi pemilihan lokasi seperti Program KOTAKU memiliki pertimbangan tingkat urgensi untuk lingkungan yang diprioritaskan. Hal ini menunjukkan adanya tindakan masyarakat untuk memulai berpartisipasi dengan mengajukan proposal perbaikan gertak.

Program SANIMAS juga melakukan pertimbangan pada pemilihan lokasi dengan pilihan menyesuaikan kondisi lingkungan dengan jenis sarana yang akan dibangun. Masyarakat menanggapi dengan baik meskipun hanya satu lokasi yang terpilih dengan memberikan penjelasan akan pertimbangan lokasi serta tingkat urgensi lingkungan.

Berdasarkan partisipasi yang terlihat masyarakat mampu sudah dapat bertanggung jawab pada pelaksanaan program. Meskipun tidak sepenuhnya warga parit nenas memiliki porsi pemegang keputusan pada masyarakat. Dalam tingkatan partisipasi warga parit nenas dapat dikatakan masuk dalam Tokenisme menurut Arnstein yang mencakup Informasi, konsultasi, placation/menenangkan.

Kondisi partisipasi masyarakat parit nenas sudah memiliki pengaruh terhadap berjalannya program. Tetapi dalam pengambilan keputusan pelaksanaan masukan dari warga belum dapat menentukan hasil dari keputusan masih didominasi oleh keputusan yang diambil oleh pihak program.

4.4. Rekomendasi

Rekomendasi peningkatan partisipasi masyarakat secara keseluruhan dari pemahaman disetiap program. Berikut penghambat partisipasi dengan rekomendasi dalam peningkatan partisipasi.

- a. Setiap tahapan sosialisasi program tidak semua warga hadir dalam sosialisasi dan beberapa yang hadir masih belum dapat memahami materi yang disampaikan oleh fasilitator. Sosialisasi tidak hanya dilakukan didalam forum atau rembuk saja namun dapat dilakukan secara intensif dan dikemas untuk menarik perhatian warga. Pendekatan yang seharusnya dilakukan bukan pengenalan program saja namun diikuti serangkaian kegiatan sosialisasi yang disertai lomba-lomba yang melibatkan masyarakat dengan tema sesuai dengan program yang akan dilaksanakan.
- b. Tahapan perencanaan dalam program perlu dikemas dengan menggunakan analisis tulang ikan maupun *mind mapping* guna melihat faktor penyebab permasalahan dan mendapatkan solusi. Dalam tahap ini masyarakat diwajibkan untuk ikut serta secara langsung dalam prosesnya guna memiliki rasa kepemilikan lingkungannya sendiri.
- c. Tahapan pemetaan swadaya dilakukan oleh warga yang menggambar dan menunjukkan informasi mengenai sarana dan prasarana lingkungannya. Gambar pemetaan swadaya diserahkan kepada masyarakatnya dalam bentuk atau model yang diinginkan. Bagaimana juga tujuan dari pemetaan

swadaya ini dilakukan agar masyarakat memahami betul lokasi-lokasi dan permasalahan di lingkungannya.

- d. Implementasi program yang tertunda mengakibatkan kejenuhan informasi di masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat menurun. Pentingnya keterbukaan informasi kepada warga akan penundaan program supaya masyarakat dapat paham masalah penundaan program tersebut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

- a. Partisipasi masyarakat dalam kedua program peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan tingkat partisipasi masyarakat masih perlu adanya usaha peningkatan partisipasi, diantaranya : Program KOTAKU masih dalam tahap perencanaan yang mencakup lingkungan RT 01 RW 18, RT 01 dan RT 02 RW 18. Program KOTAKU memiliki 3 tahapan program yaitu : tahapan persiapan, tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan keberlanjutan.
- b. Program SANIMAS yang konsen terhadap masalah sanitasi lingkungan masyarakat ini sudah terlaksana di lingkungan RT 01 RW 18 yang dilaksanakan dari bulan November 2017 hingga maret 2018. Program SANIMAS memiliki 4 tahapan program diantaranya tahapan persiapan, tahapan perencanaan, tahapan

pelaksanaan, tahapan operasional dan pemeliharaan.

- c. Pemahaman partisipasi masyarakat dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas permukiman kumuh. Dari tahapan-tahapan partisipasi masyarakat saat implementasi program KOTAKU dan program SANIMAS dapat dilihat jenis-jenis, model, dan tingkatan partisipasi.
- d. Untuk jenis partisipasi dapat dilihat dari tahap awal persiapan hingga operasional dan pemanfaatan masyarakat memberikan waktu, tenaga dan pikiran. Dari ke 6 (enam) jenis partisipasi untuk warga parit nenas masih kurang terlihat dalam pikiran, uang dan dana. Kemampuan dan keterbatasan ekonomi masyarakat dapat menghambat jenis partisipasi uang dan dana.
- e. Untuk Model CLEAR yang paling terlihat ialah Model Can do (Mampu). Partisipasi masyarakat lingkungan parit nenas memiliki rasa keterlibatan didalam Program Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh. Untuk awal partisipasi, masyarakat belum mampu dalam ikut serta secara langsung.
- f. Tingkatan partisipasi warga parit nenas dapat dikatakan masuk dalam Tokenisme menurut arnstein yang mencakup Informasi, konsultasi, placcation/menenangkan.

Pengambilan keputusan pelaksanaan masukan dari warga belum dapat menentukan hasil dari keputusan masih didominasi oleh keputusan yang diambil oleh pihak program.

5.2. SARAN

Kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh ini membutuhkan swadaya partisipasi masyarakat yang seharusnya bisa dapat lebih dari 50% warga memiliki rasa tanggung jawab atas program yang sudah dilaksanakan. Selain itu pentingnya meningkatkan rasa gotong royong sendiri seharusnya tidak hanya karna adanya program peningkatan kualitas permukiman kumuh namun kesadaran masyarakat dalam menggerakkan kegiatan yang dapat mengurangi kekumuhan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, Sherry R. 1969. A Ladder
Arnstein, Sherry R. 1969. A Ladder Warga Negara Partisipasi.
<http://lithgow-schmidt.dk/sherryarnstein/ladder-of-citizen-participation.html>
diakses pada 26 Januari 2018.
- Auliannisa, D. (2009). *Permukiman Kumuh Di Kota Bandung*. Depok : Universitas Indonesia.
- Azhari, K. I. (2011). *Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Perencanaan Dalam Program Neighbourhood Development*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Dunn, William N. (200). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi Kedua*. (Fakultas ISIPOL UGM, Penerjemah). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mikkelsen, B. (2011). *Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nasdian, F. T. (2015). *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Karianga, Hendra. (2011). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah* (Prespektif Hukum dan Demokrasi). Bandung: PT Alumni.
- Kementrian PUPR Direktorat Jendral Cipta Karya. (2017). *Petunjuk Teknis SANIMAS Reguler*. Jakarta. Direktorat pengembangan PLP.
- Kementrian PUPR Direktorat Jendral Cipta Karya. (2016). *Petunjuk Pelaksanaan Program KOTAKU tingkat Desa/Kelurahan*. Jakarta. Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman.
- Kementrian PUPR Direktorat Jendral Cipta Karya. (2016). *Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kota Pontianak*. Pontianak. Pemerintah Daerah Kota Pontianak.

SK Walikota Pontanak No 367/D-
PRKP/Tahun 2017 ***Tentang
Penetapan Lokasi Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh
di Kota Pontianak.***

***Septianty, I. (2012). Partisipasi
Masyarakat Dalam Implementasi
Pnpm Mandiri Perkotaan Dengan
Penggunaan Model Clear Di
Kelurahan Kaliabang Tengah
Kecamatan Bekasi Utara . Depok:
Universitas Indonesia.***

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011
***Tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman.***